



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI AWALUDDIN

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

BUDI AWALUDDIN
NIP 197801171997111001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Budi Awaluddin
 NIP : 197801171997111001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	e-SAKIP	Definisi: Survey kepada masyarakat dan instansi terkait kepuasan layanan dukcapil yang dilakukan di loket-loket pelayanan dan instansi pengguna data base kependudukan. Untuk perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan sekarang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017. Metode Pengukuran: $SKM = \text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang terisi} \times \text{Nilai Penimbang sesuai dengan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik}$ Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	90	90	90	90	90	Indeks
2	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	1	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	e-SAKIP	Definisi: Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Metode Pengukuran: 1. Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : KTP-el, KK, KIA (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100%) 2. Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil : Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100%) Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88.57	90.5	92	93.29	93.29	Persen
		2	Persentase Kampung Sadar Adminduk (Kamsa)	e-SAKIP	Persentase kawasan/ kampung/RW yang capaian kepemilikan dokumen adminduk sama dengan atau lebih besar dari target Nasional Metode Pengukuran: Jumlah Kamsa dibagi target kamsa (267 kawasan/ kampung/ RW) dikalikan 100% Sumber Data : Data base kependudukan dan Data Pelayanan Adminduk	15	30	50	100	100	Persen

3	Peningkatan pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	1	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	e-SAKIP	<p>Definisi: Pemanfaatan data penduduk (agregat, database dan verifikasi data) oleh lembaga/ instansi pengguna data</p> <p>Metode Pengukuran: Instansi pengguna data penduduk / target instansi pengguna data (sebanyak 130 instansi) i x 100%</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	N/A	80	90	100	100	Persen
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$</p> <p>2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $\leq 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p> <p>3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $\leq 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p> <p>Sumber Data: Sistem eMonev dan eSAKIP (diolah)</p>	N/A	N/A	N/A	91	91	Persen
5	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengentasan Kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial Nomor (42)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengentasan Kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial Nomor (42)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase

7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
Sasaran Khusus											
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfo menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi <i>editorial plan</i> sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (<i>draft press release</i> dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat

13	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
14	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase
Sasaran Operasional											
16	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
18	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D

Jakarta, 6 Februari 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,



Budi Awaluddin
NIP. 197801171997111001

SASARAN KINERJA PEGAWAI

NAMA INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PERIODE PENILAIAN :
1 JANUARI 2022 S.D 31 DESEMBER 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	: Budi Awaluddin	Nama	: Marullah Matali
NIP	: 197801171997111001	NIP	: 196511271996031003
Pangkat/Gol Ruang	: Pembina Tk.I (IV/b)	Pangkat/Gol Ruang	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	: Kepala Dinas	Jabatan	: Sekretaris Daerah
Unit Kerja	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Unit Kerja	: Sekretariat Daerah
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Memberikan pemenuhan hak atas layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	90
2	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	93,29
3		Persentase Kampung Sadar Adminduk (Kamsa)	100
4	Peningkatan pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	100
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91
6	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Pengentasan Kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial (KSD Nomor 42)	100
7		Persentase penyelesaian Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12)	100
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD Nomor 29)	100
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	100
10		Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	100
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	100
12	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	3
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	91
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95
17	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100
18	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100
19	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100
21	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100
B. KINERJA TAMBAHAN			

Pegawai yang Dinilai,



Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001

Jakarta, Januari 2022
Pejabat Penilai Kinerja,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003


SASARAN KINERJA PEGAWAI

NAMA INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PERIODE PENILAIAN :
1 JANUARI 2022 S.D 31 DESEMBER 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	: Budi Awaluddin	Nama	: Marullah Matali
NIP	: 197801171997111001	NIP	: 196511271996031003
Pangkat/Gol Ruang	: Pembina Tk.I (IV/b)	Pangkat/Gol Ruang	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	: Kepala Dinas	Jabatan	: Sekretaris Daerah
Unit Kerja	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Unit Kerja	: Sekretariat Daerah
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Memberikan pemenuhan hak atas layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	90
2	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	93,29
3		Persentase Kampung Sadar Adminduk (Kamsa)	100
4	Peningkatan pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	100
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91
6	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Pengentasan Kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial (KSD Nomor 42)	100
7		Persentase penyelesaian Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12)	100
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD Nomor 29)	100
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	100
10		Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	100
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	100
12	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	3
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	91
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95
17	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100
18	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100
19	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100
21	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100
B. KINERJA TAMBAHAN			

Pegawai yang Dinilai,


Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001

Jakarta, Januari 2022
Pejabat Penilai Kinerja,


Marullah Matali
NIP 196511271996031003